

P U S A T     I N F O R M A S I     K O M P A S  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743  
=====

KOMPAS Minggu, 16-07-2006. Halaman: 28

Seni rupa  
LAGI-LAGI, SALAH PAHAM...  
Oleh Enin Supriyanto

Harusnya gampang dibikin susah. Tanya kenapa.  
(Headline iklan rokok)

Persoalan kebebasan berekspresi, yang saat ini sedang terancam pasungan RUU APP, bukanlah hal yang unik berlaku di Indonesia saja. Di beberapa negara lain bias konsep dan hukum agama tertentu yang bersinggungan dengan praktik hukum negara demokratis sering kali jadi penyebab lahirnya keinginan dan praktik politik yang memasung kebebasan berekspresi. Dari sisi lain, bisa dikatakan bahwa kebebasan berekspresi sedang menghadapi tantangan berkenaan dengan perubahan konstelasi hubungan sosial di tingkat global yang ditandai, salah satunya, oleh meningkatnya kecenderungan friksi dan konflik antaragama dan nilai budaya yang berbeda-beda. Soal-soal seputar ini mengemuka dalam forum pertemuan terbatas-melibatkan sejumlah tokoh ahli media, sosiolog, jurnalis, serta kalangan seni dari sejumlah negara Asia dan Eropa-yang berlangsung di Siprus, minggu lalu. Saya diundang hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan itu (Asia-Europe Foundation "9th Talks on the Hill": Pressing Freedoms-Managing Creative Liberties in a Multi-faith and Multi-cultural Context, Cyprus, 29 Juni-1 Juli 2006).

Dalam kesempatan itu, saya beruntung bisa berbincang dengan Dr Agnes Callamard, Direktur Eksekutif Article 19, lembaga independen yang secara khusus melakukan pemantauan, promosi, dan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi sejalan dengan semangat Pasal 19 dalam Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia PBB. Dalam perbincangan itu, saya sampaikan pokok pikiran saya dalam menolak RUU APP, seperti tertulis dalam esai saya "Salah Paham dan Takut pada Kebebasan?" ("Bentara", Kompas, 3 Juni 2006). Pokok pikiran dan argumen sepenuhnya saya sandarkan pada prinsip kesetaraan hak asasi manusia, hak kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab negara, pemerintah, serta semua pihak untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut (Pasal 1, Pasal 19, dan Pasal 30 Deklarasi Umum HAM PBB).

Dalam salah satu bagian esai itu, saya mempertanyakan dan mengkritik pokok pikiran Jim Supangkat (di dalam esainya: Seni, Erotisme dan Undang-undang, Majalah Visual Arts No 12, April-Mei 2006, hal 100-103). Pokok pikirannya itu ia uraikan lagi dalam tulisannya "Nabi-isme, Ideologi Seni, Kebebasan Ekspresi" (Kompas, Minggu, 2 Juli 2006) dengan tambahan penjelasan untuk menjawab dan menolak kritik saya. Kali ini saya ingin mengemukakan lagi sejumlah keberatan saya pada pokok pikiran Jim, sambil sesekali menegaskan pokok pikiran saya karena tampaknya Jim masih saja salah memahami pandangan saya akan kebebasan berekspresi. Harapannya, akan makin jelaslah perbedaan pokok pikiran saya dan Jim dalam hal penolakan terhadap RUU APP dan soal-soal lain di seputar itu.

\*\*\*

Mari kita mulai dengan melihat kekacauan argumentasi yang diajukan Jim Supangkat. Ia mulai dengan bercerita tentang pokok pikiran yang ia kemukakan ketika hadir dalam acara dengar pendapat dengan Pansus RUU APP. Ia mengemukakan bahwa "hanya 12 persen penduduk Indonesia yang bisa kritis menimbang baik-buruknya pornografi, sementara 88 persen penduduk tidak." Dan kemudian, ia melanjutkan dengan pernyataan bahwa "Pasal-pasal RUU APP tidak cuma membendung pornografi. Pasal-pasal ini meluas ke berbagai aspek kehidupan. Bila RUU ini disahkan, akan terbentuk sistem kontrol sosial yang justru merugikan kelompok 88 persen. Sistem kontrol ini bisa menghambat kelompok 88 persen meraih kemajuan."

Dari kutipan tersebut, tampaknya Jim ingin mendasarkan argumennya pada kajian sosiologis-historis bahwa modernisasi Indonesia cuma dinikmati oleh 12 persen penduduk, sedangkan 88 persen masih berjuang untuk meraihnya. Meski tak paham darimana persisnya ia memperoleh angka persentase itu, saya tidak punya keberatan dengan Jim bahwa hak dan kebebasan berpendapat, berekspresi, harus berlaku merata bagi semua warga negara. Bedanya, saya tidak punya dasar moral ataupun politik untuk memilah warga negara dan hak kebebasan sipilnya ke dalam dua kelompok terpisah berdasarkan angka persentase itu. Saya tidak punya cara pandang elitis bahwa 88 persen penduduk Indonesia tidak bisa "kritis menimbang baik buruknya pornografi". Saya jelas-jelas mengecam pembelaan atas hak kebebasan berekspresi yang bersifat "setengah hati", baik dari kalangan seni atau dari kalangan lain.

Anehnya, pada sebagian akhir esainya Jim justru mengecam bahwa saya-dan mungkin sejumlah seniman dan kurator lain, yang disebutnya dengan istilah "pembela Agus Suwage"-terjangkit ideologi elitis seni rupa modern yang menurutnya berpangkal pada "Nabi-isme". Ia sibuk menjelaskan bagaimana ideologi ini muncul di kalangan seni di Perancis, bagaimana ideologi ini menyusup ke benak seniman Indonesia, dan sekaligus mengalami perubahan karena konsep seni dan seniman di Indonesia, akibat berbagai faktor, berbeda dengan yang terjadi di Barat.

Padahal jelas-jelas dengan mengutip pasal-pasal dari Deklarasi Umum HAM PBB saya menolak pandangan elitis mana pun. Lagi pula, bukankah Jim sendiri yang dengan yakin mendasarkan pandangannya pada angka persentase 12 persen elite dan 88 persen awam penduduk Indonesia? Pada bagian awal penjelasannya tentang Nabi-isme itu sendiri ia justru memulai dengan pernyataan bahwa "kebebasan ekspresi dalam kesenian tidak bisa disejajarkan dengan kebebasan menyatakan aspirasi, kebebasan pers, dan kemerdekaan." Ini lebih cocok masuk dalam kelompok argumen dan pembelaan "setengah hati" dan elitis terhadap kebebasan berekspresi yang justru saya kecam. Rupanya, Jim kurang awas bahwa telunjuknya sedang menuding dirinya sendiri.

Kerancuan pikiran Jim Supangkat bertebaran di sepanjang tulisannya itu. Ia, misalnya, sibuk menjelaskan pangkal perbedaan pendapat saya dengan dirinya yang "seolah-olah" bermula dari ajakan untuk menandatangani petisi yang dirumuskan oleh sejumlah kurator, termasuk saya, dan sejumlah seniman, yang pada pokoknya mengecam semua tindakan semena-mena dan penuh ancaman kekerasan terhadap kebebasan berkesenian di Indonesia-sehubungan dengan kasus yang menimpa karya instalasi Agus Suwage-Davy Linggar saat dipamerkan di CP Biennale II. Saya katakan "seolah-olah" karena sebenarnya saya tidak pernah mempersoalkan apakah Jim bersedia ikut menandatangani petisi itu atau tidak. Itu sepenuhnya hak dan pilihannya. Yang jelas saya lakukan adalah berupaya mengajak Jim Supangkat untuk bersedia bertemu dengan rekan-rekan (Agus Suwage, Davy Linggar, Izabel Yahya, Anjasmara) untuk berdialog, bertukar pendapat-dan kalau mungkin, menyusun strategi hukum bersama-karena ketika itu rekan-rekan itu

sudah dipanggil polisi dengan status tersangka. Dengan sejumlah alasan, sebagian seperti ia ungkapkan dalam tulisannya itu, Jim menolak.

Baiklah, itu soal lain. Yang lebih penting adalah bahwa esaisaya di "Bentara" tak ada hubungannya dengan petisi/manifesto kebebasan berekspresi yang disinggung Jim itu. Esai saya adalah pandangan pribadi untuk menolak RUU APP. Adapun petisi/manifesto itu adalah pernyataan kolektif yang sebenarnya tidak cuma membela kebebasan berekspresi seniman dan model yang terlibat, tetapi juga penyelenggara kegiatan seni, termasuk CP Biennale. Bagian esai saya yang menyinggung tulisan Jim Supangkat di Visual Arts adalah bagian yang mempertanyakan dan meragukan sikapnya yang "setengah hati" membela kebebasan berekspresi dan memberi klaim bahwa ada sikap moral khas pada seniman Indonesia karena sumber keseniannya "yang digali dari spirit masyarakat".

Saya menolak pembelaan terhadap kebebasan berekspresi yang didasarkan pada narasi elitis semacam ini. Saya mengajukan pandangan tentang pentingnya mengadakan dan melindungi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang jadi bagian terpadu-kalau tidak salah satu yang paling mendasar, berdampingan dengan hak hidup-dari kebebasan warga (civic liberties). Saya tidak berniat mengurus ideologi elitis seniman yang merasa dirinya setara Nabi-apalagi dari Perancis segala, kalau memang ada-dan saya menolak posisi khusus segelintir orang yang mendaku diri paling mampu menggali "spirit masyarakat". Dengan kata lain, bagi saya, Agus Suwage, atau seniman siapa pun, bukan nabi yang harus didengar sabdanya. Agus Suwagecuma seorang warga negara sah republik ini yang menyampaikan perasaan, pendapat, pikirannya dengan cara yang mampu ia lakukan-melalui karya seni rupa-tanpa mengancam apalagi mencederai kebebasan orang lain. Maka, hak dan kebebasannya pantas dan perlu dibela. Itu saja. Tak perlu "Nabi-isme" dari Perancis segala. Terlalu jauh.

\*\*\*

Sebagai penutup, mari kita ikuti bagaimana Jim Supangkat memulai tulisannya itu dengan nada heroik, dengan mengutip pidato mantan Presiden AS John F Kennedy, Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Pertama, Jim tidak mengutip dengan tepat. Ucapan sebenarnya dari John F Kennedy, yang disampaikan saat pelantikannya, Jumat, 20 Januari 1961, adalah ask not what your country can do for you-ask what you can do for your country.

Jika Jim mengutip tepat dan memahami kutipan itu dalam konteks yang lengkap, ia mestinya tak tega dan semena-mena melakukan tafsir pelintiran, yang entah apa maksudnya, "Jangan tanya apa yang bisa diberikan masyarakat dan dunia seni rupa kepadamu, tanya kenapa?"

Dengan gaya pelintiran yang sama, kali ini meminjam naskah iklan rokok yang sedang populer, bolehlah kita ajukan pertanyaan pada Jim Supangkat, "Kalau memang cuma setengah hati membela kebebasan berekspresi, kenapa tanya-tanya?"

Enin Supriyanto  
Penulis, Kurator Seni Rupa